

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Berau

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau.
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau.
 - 4) Masih kurangnya kompetensi sumber daya aparatur dan jumlah aparatur
 - 5) Masih kurangnya disiplin Aparatur Sipil Negara
- b. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :
 - 1) Pemahaman masyarakat tentang kependudukan masih rendah
 - 2) Advokasi dan KIE mengenai KB belum responsive gender
 - 3) Masih lemahnya koordinasi antar instansi dan lembaga terkait, terutama permintaan data mengenai kependudukan dan data keluarga.
 - 4) Peran Bidan dan petugas lapangan (PLKB/PKB) dalam konseling belum optimal
- c. Permasalahan terkait Keluarga Berencana :
 - 1) Unmetneed Tinggi
 - 2) Askseptor KB non MKJP masih cukup besar
 - 3) Masih adanya anggapan KB hanya urusan perempuan
 - 4) Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun di karenakan tekanan ekonomi keluarga.
 - 5) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh KB.
 - 6) Masih rendahnya partisipasi pria ber KB
- d. Permasalahan terkait Keluarga Sejahtera :
 - 1) Masih kurangnya permodalan untuk kelompok UUPS
 - 2) Kurangnya partisipasi anggota kelompok UPPKS dalam melaksanakan program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah.
 - 3) Masih di temukan keluarga Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera 1 (KS1).
 - 4) Masih kurangnya pemahaman tentang keluarga sejahtera yang ber KB.
 - 5) Kurangnya fahamnya masyarakat tentang pentingnya kelompok BKB, BKR dan

BKL

- 6) Cakupan dan peran serta Pusat Informasi dan Konseling Remaja / Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal
- 7) Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksinya masih rendah
- e. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - 1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
 - 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - 3) Belum semua OPD melaksanakan PPRG
 - 4) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - 5) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
- f. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
 - 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - 2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
 - 3) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
 - 4) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
 - 5) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana
- g. Permasalahan terkait perlindungan anak:
 - 1) Belum optimalnya lembaga penyedia anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 - 2) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
 - 3) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
- h. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
 - 1) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
 - 2) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 - 3) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 - 4) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- i. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :
 - 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah :

“Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan”

Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah **Sejahtera** yang berarti Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Berau yang memiliki rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Berau. (Boleh lebih dari satu unsur atau di tambah dgn unsur Daya saing dan unggul didiskusikan dgn kadis dan kapid, RPJMD Bab 5)

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Misi Kedua: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal
3. Misi Ketiga: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi
4. Misi Keempat: Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau mendukung pencapaian Misi Kedua : “Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal”. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau adalah Kebijakan sektor perekonomian akan diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan pelaku ekonomi

sektor informal berbasis gender, Jumlah penduduk yg terkendali dapat membantu menanggulangi masalah dan berbagai isu penting untuk kesejahteraan dengan sasaran adalahMeratanya pendapatan masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan DPPKBP2PA Kabupaten Berau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Kedua : Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relative rendah di banding kondisi ideal 100. • Indek Pemberdayaan Gender (IDG) relative rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Belum optimalnya OPD melaksanakan PPRG • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum maksimalnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan atau partisipasi perempuan dalam legeslatif, Perempuan tenaga professional dan Sumbangan penghasilan perempuan terhadap keluarga • Perencanaan dan penganggaran responsip gender belum optimal. • Belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD tentang PUG. • Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum optimal • Dukungan regulasi terhadap perlindungan perempuan dan anak belum optimal • Lembaga penanganan kasus perempuan dan anak di kecamatan dan desa masih terbatas • Kualitas kader/ tenaga pendamping masih kurang • Terbatasnya jumlah, cakupan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen dari pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung urusan PPPA • Dukungan lembaga pemerhati perempuan dan anak antara lain Pokja PUG, gugus tugas Tindak Pidana Perdaagnan Orang (TPPO), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan P2TP2A. • Terbentuknya Forum anak di Kabupaten • Adanya komitmen Kepala
2	Tujuan : <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan sektor perekonomian akan diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan pelaku ekonomi sektor informal berbasis gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan banyak menjadi objek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga penanganan kasus perempuan dan anak di kecamatan dan desa masih terbatas • Kualitas kader/ tenaga pendamping masih kurang • Terbatasnya jumlah, cakupan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan lembaga pemerhati perempuan dan anak antara lain Pokja PUG, gugus tugas Tindak Pidana Perdaagnan Orang (TPPO), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan P2TP2A. • Terbentuknya Forum anak di Kabupaten • Adanya komitmen Kepala

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan DPPKBP2PA Kabupaten Berau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk yg terkendali dapat membantu menanggulangi masalah dan berbagai isu penting untuk kesejahteraan 	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana Belum optimalnya lembaga penyedia pelayanan dan perlindungan anak korban kekerasan yang memenuhi perlindungan khusus Terjadinya berbagai praktek buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) 	<ul style="list-style-type: none"> kelengkapan data pilah dan sistem informasi tentang PPPA Masih kurangnya keterlibatan anak dalam Forum Anak Masih kurangnya pemahaman dari pemerintah, OPD dan masyarakat tentang KLA 	<ul style="list-style-type: none"> Daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
3	Sasaran : Meratanya pendapatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Munculnya berbagai tindakan kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual dan penipuan terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime. Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti dan adanya anak terlantar Masih di temukannya perkawinan pada usia anak. Belum semua Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas umum lainnya termasuk kategori ramah anak tentang kependudukan masih rendah Advokasi dan KIE mengenai KB belum responsive gender. Masih lemahnya koordinasi antar instansi dan lembaga terkait, permintaan data kependudukan dan data keluarga. Peran petugas lapangan PKB / PLKB dan Bidan dalam konseling belum optimal Unmet Need Tinggi Akseptor KB non MKJP masih cukup besar Masih adanya anggapan KB hanya urusan perempuan. Masih rendahnya partisipasi pria ber KB Pernikan perempuan usia di bawah 20 tahun di karenakan tekanan ekonomi keluarga. 	<ul style="list-style-type: none"> cakupan dan kelengkapan data pilah dan sistem informasi tentang KB dan data keluarga Dukungan kader dan masyarakat dalam pendataan belum maksimal Kompetensi dan jumlah PKB yang masih kurang ideal di banding jumlah kampung yang ada. Persentase Unmet need masih tinggi. Pelayanan kontasepsi secara gratis pada masyarakat miskin belum optimal Belum semua klinik KB tersedia tenaga medis yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung urusan KB Petugas PKB yang bertugas di Kecamatan Adanya dukungan tim KB kecamatan, Desa/ Kelurahan. Komitmen Mitra kerja terhadap program KB semakin besar. Adanya peningkatan kualitas PKB/

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan DPPKBP2PA Kabupaten Berau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh KB. Masih kurangnya permodalan untuk kelompok UPPKS Kurangnya partisipasi anggota kelompok UPPKS dalam program kegiatan pemerintah. Masih di temukannya keluarga keluarga Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera 1(KS1) Masih kurangnya pemahaman tentang keluarga sejahtera yang berKB Kurang fahamnya masyarakat tentang pentingnya Kelompok BKB, BKR dan BKL Cakupan dan peran serta Pusat Informasi Konseling Remaja / Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal. Pengetahuan Remaja mengenai kesehatan Reproduksi masih rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan penganggaran kegiatan UPPKS belum optimal. Masih kurangnya pemahaman tentang keluarga sejahtera yang ber KB Kurangnya pelatihan bagi kader untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bina keluarga Terbatasnya kemampuan para Pembina dalam pelaksanaan pembinaan PIK Rendahnya tingkat pengetahuan pada kader 	<ul style="list-style-type: none"> PLKB/Bidan atau kader melalui Bimbingan teknis dan pelatihan melalui BKKBN Animo masyarakat khususnya perempuan/ibu ibu meningkatkan keteampilan melalui pelatihan untuk meningkatkan pendapatan dan menunjang ekonomi keluarga Animo masyarakat tinggi dalam kegiatan bina keluarga Melalui PKB pembinaan desa/ kecamatan dapat membentuk PIK R/M berbasis sekolah ataaau masyarakat Adanya pelatihan untuk pendidik, kader,Pembina, pengelola dan konselor sebaya melalui BKKBN

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2.a
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas PPKBP2PA Kabupaten Berau	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • Belum optimalnya OPD melaksanakan PPRG 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Belum maksimalnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan atau partisipasi perempuan dalam legeslatif, tenaga professional dan sumbangan penghasilan perempuan terhadap keluarga. • Belum optimalnya fungsi koordinasi antara OPD tentang PUG 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain • Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legislatif • Masih kurangnya perempuan sebagai petugas professional • Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga 		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan TPPO • Belum semua korban kekerasan perempuan yang mendapatkan penanganan optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum optimal • Lembaga penanganan kasus perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan lembaga pemerhati perempuan dan anak antara lain pokja PUG, gugus tugas tindak pidana

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas PPKBP2PA Kabupaten Berau	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya lembaga pelayanan perempuan 	dan anak di kecamatan dan desa masih terbatas	perdagangan orang (TPPO), PUSPAGA dan P2TP2A
	b. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran kelembagaan PUG 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas kader / tenaga pendamping masih kurang • Dukungan regulasi terhadap perlindungan perempuan dan anak belum optimal 	
3	a. Meningkatkan implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua fasilitas pendidikan, Kesehatan dan fasilitas umum lainnya termasuk kategori ramah anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya pemahaman dari pemerintah daerah, OPD dan masyarakat tentang KLA 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya peran forum anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya keterlibatan anak dalam Forum Anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Di bentuknya Forum Anak tingkat Kabupaten
	c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktek buruk yang mengancam hak – hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) • Munculnya berbagai tindakan kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual dan penipuan terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data pilah dan sistem informasi tentang PA 	<ul style="list-style-type: none"> • Di bentuknya P2TP2A
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas PPKBP2PA Kabupaten Berau	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	perlindungan anak			anak

Tabel 3.2.b
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN Pusat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP) dari 1,49 menjadi 1,21	Pemahaman masyarakat tentang kependudukan masih rendah	Advokasi program kependudukan belum optimal	Komitmen pemerintah pusat terhadap program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga cukup besar
2.	Menurunnya Angka Kelahiran total (TFR) per WUS (Wanita Usia Subur) (15-49 tahun) dari 2,6 menjadi 2,28	- Advokasi dan KIE mengenai KB belum responsif gender - Peran bidan dan petugas lapangan KB dalam konseling belum optimal	Anggapan KB hanya untuk wanita	- Terbentuknya tim KB desa kecamatan/ kelurahan dan desa. - Adanya komitmen pemerintah desa dengan adanya pengalokasian dana melalui Dana Alokasi Desa (ADD)
3.	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR) dari 61,9 menjadi 66%	- Akseptor KB non MKJP masih cukup besar - Peserta KB pria masih rendah	- Pelayanan kontrasepsi secara gratis pada masyarakat miskin belum optimal - Kesertaan pria ber-KB masih rendah	Dukungan pemerintah terhadap program KB cukup besar
4.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) dari 11,4 % menjadi 9,91%	Persentase Unmeet need masih tinggi	Wilayah kerja PKB/PLKB yang topografinya berbukit dan persebaran penduduk yang tidak merata Keterbatasan PKB/PLKB baik secara kualitas maupun kuantitas	Adanya peningkatan kualitas PKB/PLKB bidan/kader melalui bintek/pelatihan
5.	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) dari 48	Cakupan dan peran serta Pusat Informasi dan konseling Remaja/ Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal	Kesadaran masyarakat dan sekolah tentang pentingnya Pusat Informasi dan	Dukungan lembaga pendidikan khususnya para mahasiswa cukup

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	per 1000 kelahiran menjadi 38 per 1000 kelahiran	Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksinya masih rendah	Konseling Remaja/ Mahasiswa belum optimal Pengaruh sosial budaya	besar KIE melalui media cetak dan elektronik
6.	Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (wanita Usia Subur) (15-49 tahun) dari 7,1 menjadi 6,6	Peserta KB MKJP masih rendah	Masih tingginya peserta KB jangka pendek	Dukungan mitra kerja dalam peningkatan peserta KB jangka panjang cukup besar

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Provinsi yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.3.a
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Berau	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya indeks pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 	<ul style="list-style-type: none"> Belum maksimal nya keterlibatan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Berau	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	gender dan indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none">• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.• Belum optimalnya OPD melaksanakan PPRG	<p>dalam pembangunan atau partisipasi perempuan dalam legislatif, perempuan tenaga profesional, Rendahnya Sumbangan penghasilan terhadap keluarga dan belum optimalnya pemberdayaan lansia (potensi) perempuan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.• Belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD tentang PUG	untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none">• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO• Perempuan banyak menjadi objek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan• Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana• Belum semua korban kekerasan yang belum mendapat penanganan optimal• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.	<ul style="list-style-type: none">• Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum maksimal• Lembaga penanganan kasus perempuan dan anak di kecamatan dan desa masih terbatas	<ul style="list-style-type: none">• Dukungan lembaga pemerhati perempuan dan anak antara lain Poja PUG, Gugus tugas tindak pidana perdagangan orang (TPPO), PUSPAGA dan P2TP2A.
3	Terimplementasinya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan	<ul style="list-style-type: none">• Belum semua fasilitas pendidikan, Fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya termasuk kategori ramah anak.	<ul style="list-style-type: none">• Masih kurangnya pemahaman dari pemerintah, OPD dan Masyarakat tentang KLA.	<ul style="list-style-type: none">• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Berau	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	khusus anak	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya peran forum anak Terjadinya berbagai praktek buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan anak dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Belum optimalnya lembaga penyedia anak memerlukan perlindungan khusus 	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya keterlibatan anak pada Forum Anak Terbatasnya jumlah cakupan dan kelengkapan data pilah dan sistem informasi tentang PA 	an Kota Layak Anak

Tabel 3.3.b
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN Provinsi Perangkat Daerah Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kebijakan tentang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS) pada provinsi/ kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> Pemahaman masyarakat tentan kependudukan masih rendah Unmet need tinggi Peran petugas lapangan PKB dan Bidan dalam konseling belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya jumlah cakupan dan kelengkapan data pilah dan sistem informasi tentang KB dan data keluarga Persentase Unmet Need masih tinggi Kompetensi dan jumlah PKB yang masih kurang ideal di banding jumlah kampung yang ada. 	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen pemerintah pusat terhadap program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga cukup besar Adanya peningkatan kualitas PKB atau kader melalui bimbingan teknis dan pelatihan melalui BKKBN
2.	Peningkatan keluarga sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya permodalan untuk kelompok UPPKS Masih kurangnya pemahaman tentang Keluarga Sejahtera yang ber KB Kurang fahamnya masyarakat tentang 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan penganggaran kegiatan UPPKS belum optimal Masih kurangnya pemahaman tentang keluarga sejahtera yang ber KB 	<ul style="list-style-type: none"> Animo masyarakat khususnya perempuan / ibu –ibu meningtkkan keterampilan melalui pelatihan untuk

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		pentingnya kelompok BKB, BKR dan BKL	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pelatihan bagi kader untuk meningkatkan pemahaman bina keluarga 	meningkatkan pendapatan dan menunjang ekonomi keluarga <ul style="list-style-type: none"> Animo masyarakat tinggi dalam kegiatan bina keluarga
3.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba dan HIV/AIDS	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan dan peran serta Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya kemampuan para Pembina dalam pelaksanaan pembinaan PIK Rendahnya tingkat pengetahuan kader 	<ul style="list-style-type: none"> Melalui PKB pembinaan Desa/ Kecamatan dapat membentuk PIK R/M berbasis pendidikan atau masyarakat Adanya pelatihan untuk pendidik, kader, Pembina, pengelola dan konselor sebaya melalui BKKBN

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas PPKBP2PA Kabupaten Berau	Permasalahan Pelayanan Dinas PPKBP2PA Kab. Berau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

Pelayanan Dinas PPKBPPPA tidak terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas PPKBP2PA Kabupaten Berau (Nama Program yang Memberikan Dampak Lingkungan)	Permasalahan Pelayanan Dinas PPKBP2PA Kabupaten Berau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

Pelayanan Dinas PPKBPPPA tidak terkait dengan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategi)

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan.

Kriteria yang digunakan beserta bobot masing-masing kriteria disajikan pada Tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6
Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi	20
2	Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
5	Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	30
	Total	100

*) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Hasil scoring masing-masing permasalahan dalam rangka penentuan isu strategis disajikan pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7
Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
Bidang PA												
Belum optimalnya lembaga penyedia anak yang memerlukan perlindungan khusus	5	100	5	100	4	60	4	60	1	30	350	1
Belum optimalnya lembaga PUSPAGA dalam pemenuhan hak anak	5	100	5	100	4	60	3	45	1	30	335	2
Belum semua Fasilitas pendidikan, Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Umum lainnya yang termasuk kategori ramah anak.	4	80	4	80	4	60	4	60	1	30	310	3
Belum optimalnya pemenuhan hak anak di Kab/Kota/ Kecamatan.	5	100	5	100	3	45	1	45	1	30	310	4
Belum tersedianya system data terpilah	4	80	3	60	4	60	3	45	1	30	275	5
Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan	3	60	2	40	3	45	4	60	1	30	235	6
Masih kurangnya peran forum anak	3	60	3	60	3	45	2	30	1	30	225	7
Tingginya korban kekerasan pada anak	2	40	3	60	3	45	3	45	1	30	220	8
Bidang PP												
Belum optimalnya OPD melaksanakan PPRG	5	100	5	100	4	60	5	75	1	30	365	1
Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	5	100	5	100	4	60	4	60	1	30	350	2
Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	5	100	5	100	3	45	4	60	1	30	335	3
Belum Optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensi)	4	80	5	100	3	45	4	60	1	30	315	4

Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
perempuan.												
Belum tersedianya sistem data terpilah gender dan anak	4	80	5	100	3	45	3	45	1	30	300	5
Bidang Dalduk												
Lemahnya koordinasi antara instansi dan lembaga terkait terutama permintaan data mengenai kependudukan dan keluarga	4	80	4	80	3	45	3	45	1	30	280	3
Advokasi dan KIE mengenai KB belum responsip Gender.	5	100	5	100	5	75	3	45	1	30	350	1
Peran petugas lapangan PKB/PLKB dalam konseing belum optimal	4	80	4	80	4	60	3	45	1	30	295	2
Bidang KB												
Masih tingginya kebutuhan ber KB yg tidak terpenuhi (unmeet need)Masih tingginya	5	100	5	100	5	75	4	60	1	30	365	1
Masih rendahnya partisipasi pria ber KB	4	80	5	100	5	75	4	60	1	30	345	2
Akseptor KB Non MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang) masih cukup besar	4	80	5	100	5	75	3	45	1	30	330	3
Masih tingginya pernikahan perempuan di bawah 20 tahun karena tekanan ekonomi .	4	80	5	100	4	60	3	45	1	30	315	4
Bidang KS												
Kurangnya partisipasi anggota kelompok UPPKS dalam program kegiatan pemerintah	5	100	5	100	5	75	5	75	1	30	380	1
Masih kurangnya pemahaman tentang keluarga sejahtera yang ber KB	5	100	5	100	5	75	4	60	1	30	365	2
Kurang fahamnya	5	100	5	100	5	75	3	45	1	30	350	3

Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
masyarakat tentang pentingnya kelompok BKB, BKL dan BKL												
Cakupan dan peranan serta Pusat Informasi dan Konseling R/M belum optimal	4	80	5	100	5	75	4	60	1	30	345	4
Pengetahuan Remaja mengenai kesehatan reproduksi masih rendah	5	100	5	100	5	75	2	30	1	30	335	5
Masih di temukannya keluarga PS dan KS1	4	80	5	100	5	75	3	45	1	30	330	6
sih kurangnya pemahaman tentang keluarga sejahtera yang ber KB	4	80	4	80	5	75	3	45	1	30	310	7
Masyarakat mengganggu tanpa masuk dalam kelompok BKL pun mereka bisa merawat orang tuanya sendiri yg lansia	4	80	4	80	5	75	2	30	1	30	295	8
Sekretariat												
Masih kurangnya pelayanan internal	3	60	5	100	5	75	4	60	2	60	355	1
Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung	2	40	4	80	5	75	3	45	1	30	285	2
Masih kurangnya Disiplin ASN	2	40	3	60	5	75	3	45	1	30	250	3
Masih kurangnya kompetensi SDA dan Jumlah Aparatur	2	40	3	60	4	60	3	45	1	30	235	4
Masih kurangnya peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	40	3	60	3	45	3	45	1	30	220	5

Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

3.5.1. Isu – isu strategis pelayanan Keluarga Berencana sebagai berikut :

1. Masih tingginya kebutuhan ber KB yg tidak terpenuhi (unmeet need) Masih tingginya
2. Advokasi dan KIE mengenai KB belum responsip Gender.
3. Masih rendahnya partisipasi pria ber KB
4. Akseptor KB Non MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang) masih cukup besar
5. Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegitan (BKB, BKR ,BKL) dan UPPKS (usaha peningkatan penghasilan keluarga Sejahtera) belum optimal di masyarakat dalam mendukung kelestari ber KB
6. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga
7. Peran petugas lapangan PKB/PLKB dalam konseing belum optimal

3.5.2. Isu – isu strategis pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Belum optimalnya OPD melaksanakan PPRG
2. Belum tersedianya sistem data terpilah
3. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
4. Tingginya kasus kekerasan perempuan dan TPPO
5. Belum optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensial) perempuan
6. Belum optimalnya lembaga penyedia layanan dan perlindungan anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus
7. Belum optimalnya lembaga PUSPAGA dalam pemenuhan hak anak
8. Belum semua Fasilitas pendidikan, Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Umum lainnya yang termasuk kategori ramah anak.
9. Belum optimalnya pemenuhan hak anak di Kab/Kota
10. Belum tersedianya system data terpilah